

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Ekonomi Pembangunan

Perkembangan ekonomi memiliki beberapa istilah yang sering digunakan yaitu kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, perubahan jangka panjang serta kemajuan ekonomi.¹ Ekonomi pembangunan telah menjadi sesuatu hal yang sangat penting semenjak telah disadari bahwa adanya suatu ketimpangan pada perkembangan ekonomi yang besar antara negara yang tergolong maju dengan negara-negara negara yang masih pada tahap berkembang dimana para ahli ekonomi telah berusaha menganalisa penyebab-penyebab terjadinya ketimpangan-ketimpangan tersebut.

Komponen pokok dalam analisis ekonomi pembangunan yaitu mencakup beberapa indikator-indikator dari pertumbuhan ekonomi, permodalan, pengerahan tabungan, kemiskinan, serta beberapa bantuan dari negara asing atau luar negeri. Bidang-bidang dalam kajian ekonomi pembangunan yaitu : Pertumbuhan ekonomi, Ikut serta pemerintah, Industrialisasi dan perdagangan, Hubungan antara negara kaya dengan negara miskin, Stabilitas dan penyesuaian struktur, Perkembangan ekonomi, Pertumbuhan jumlah penduduk, serta Strategi dan tujuan dari pembangunan.²

¹ M. L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal. 4.

² Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) , hal. 39.

B. Desa Mandiri Pangan (Demapan)

1. Pengertian Desa Mandiri Pangan

Program Desa Mandiri Pangan (Demapan) merupakan program aksi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk mengurangi rawan pangan dan gizi melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan kearifan lokal perdesaan. Untuk tercapainya tujuan Demapan program dirancang dalam kurun waktu 4 tahun, melalui 4 tahapan yaitu : (i) tahap persiapan, meliputi seleksi desa rawan pangan dan pembentukan kelompok KK miskin; (ii) tahap penumbuhan, mulai adanya usaha produktif, pembentukan Lembaga Keuangan Desa (LKD), berfungsinya posyandu dan bekerjanya sistem ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta koordinasi program lintas sektor untuk pembangunan sarana prasarana wilayah perdesaan; (iii) tahap pengembangan, adanya perkembangan ekonomi produktif, peningkatan modal LKD, pengembangan sistem ketahanan pangan; (iv) tahap kemandirian, adanya peningkatan dinamika kelompok dan usaha ekonomi produktif, adanya jaringan kemitraan, berfungsinya LKD sebagai layanan modal dan berfungsinya Tim Pangan Desa (TPD) dalam mengkoordinasikan program lintas sektoral.³

Desa yang sudah mandiri berarti desa yang tidak mengalami masalah ketahanan pangan karena masyarakatnya sudah mengalami peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Adapun indikator untuk melihat desa mandiri tersebut antara lain : (1) peningkatan peran kelembagaan yang telah

³ Badan Ketahanan Pangan, *Pedoman Teknis Kegiatan Desa Mandiri Pangan*, (Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian : Jakarta, 2011), hal. 34.

ditumbuhkan terhadap terwujudnya kemandirian dan ketahanan pangan, (2) dukungan program daerah terhadap aspek pemberdayaan masyarakat, (3) dukungan pembangunan sarana prasarana untuk menunjang pembangunan tingkat desa, (4) adanya komitmen dan peran pemerintah daerah terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan program Demapan.

2. Kebijakan Kegiatan Desa Mandiri Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi kemampuannya, peluang pemecahan masalah, mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Kawasan pangan adalah kondisi suatu wilayah/daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tidak mempunyai akses secara fisik (ketersediaan) dan ekonomi (daya beli) untuk memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, beragam dan aman untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi

pertumbuhan dan kesehatan.⁴ Jumlah presentase penduduk rawan pangan pada tahun 2013 berdasarkan data hasil oalahan Badan Pusat Statistik sebanyak 18,68%, pada tahun 2015 berkurang sebanyak 5,72% atau menjadi 12,96% dan pada tahun 2016 menjadi 12,69% atau berkurang sebanyak 0,27% dari tahun sebelumnya.

Kerawanan pangan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu rawan pangan transien dan rawan pangan kronis. Rawan pangan kronis merupakan suatu keadaan rawan pangan berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu, disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) dan keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengakses pangan dan gizi, sedangkan rawan pangan transien merupakan suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh kejadian berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti bencana alam (gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, tsunami) dan konflik sosial.

Untuk mengurangi dampak rawan pangan kronis tersebut, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian sejak tahun 2015 telah mengembangkan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan. Apabila pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilaksanakan secara meluas, maka akan berdampak terhadap peningkatan ketahanan pangan masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan *Millenium Development Goals* (MDG), yaitu menghilangkan kemiskinan dan kelaparan, menjamin akses bagi semua orang, khususnya

⁴ Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, *Pedoman Umum Program Aksi Desa Mandiri Pangan (DESA MAPAN)*, (Jakarta : Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, 2010), hal. 09.

orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup serta mendorong pertanian berkelanjutan sepanjang tahun pada tahun 2030.⁵

3. Strategi Kegiatan Desa Mandiri Pangan

a) Strategi Pencapaian Tujuan

Strategi yang digunakan untuk pencapaian tujuan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilaksanakan melalui prinsip :

a) Kemandirian

Prinsip kemandirian bukanlah konsepsi fisik-biologis, melainkan budaya, yaitu menekankan pada perubahan sikap/mindset untuk berdikari, menolak segala ketergantungan dari pihak lain dan sebaliknya memaksimalkan kemampuan sendiri dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan adanya prinsip kemandirian, maka masyarakat mampu mengembalikan keadaan ke normal setelah terjadinya suatu tekanan, gejolak, atau bencana. Dengan demikian upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan diharapkan dapat terwujud.

b) Kecukupan Ekonomi

Kecukupan ekonomi adalah prinsip kewajaran untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan melindungi dari dampak perubahan internal maupun eksternal. Kecukupan ekonomi menekankan pada jalan tengah sebagai prinsip utama petani untuk mengembangkan

⁵ *Ibid.*, hal. 10-11.

pertanian dari tingkat rumah tangga, masyarakat, dan bangsa dalam rangka menjamin kecukupan pangannya. Petani dapat bertahan hidup pada tingkat ekonomis cukup, asalkan masyarakat harus bersatu dan bekerja sama dalam membantu satu sama lain untuk efisiensi biaya dan optimalisasi pemanfaatan lahan, serta pertanian yang terpadu dan berkelanjutan.

Tahap yang dilakukan terdiri dari 3 fase.

- i. Fase pertama adalah pembagian lahan pertanian, tujuan dari pembagian lahan adalah untuk optimasi manfaat/keuntungan. Pada fase ini lahan pertanian yang ada dibagi menjadi empat bagian sesuai dengan proporsinya, terdiri dari lahan/sawah, kolam/penampungan air, rumah/kandang, jalan/infrastruktur lainnya, dan tanaman hortikultura/pohon. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip pertanian berkelanjutan.
- ii. Fase kedua adalah pengembangan usaha tani dan pertanian bersama. Pada fase ini, petani didorong untuk mengembangkan usaha pertanian berdasarkan potensi sumberdaya lokal secara berkelompok/bersama-sama dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian bersama dan optimalisasi keuntungan produksi.
- iii. Fase ketiga adalah pengembangan keuangan mikro. Pada fase ini, kelompok usaha didorong untuk mengembangkan lembaga keuangan dengan cara bekerja sama dengan mitra (lembaga perbankan atau swasta) dalam rangka mendapatkan dana investasi

atau pinjaman, sehingga dapat meningkatkan layanan permodalan kepada kelompok usaha.⁶

c) Partisipatif

Pendekatan partisipatif merupakan salah satu pendekatan dalam pemberdayaan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab, motivasi, dan kepemilikan terhadap program/kegiatan yang diterima, untuk itu mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi kegiatan kawasan, masyarakat memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam segala aspek kegiatan.

d) Transparan dan Kredibel

Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Kawasan Mandiri Pangan baik pelaksana manajemen, lembaga masyarakat yang dibentuk (LKK dan FKK), kelompok, pendamping, dan mitra lainnya harus transparan dan memiliki kredibilitas dalam pelaksanaan kegiatan. Prinsip transparansi yang dilakukan dalam setiap kegiatan diharapkan dapat menjauhkan dari sikap curiga, ragu-ragu dan lalai dalam melaksanakan kegiatan dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.⁷

b) Strategi Keberlanjutan Program

Pemerintah Daerah melanjutkan pembinaan terhadap kawasan yang sudah selesai Tahap Kemandirian, melalui :

⁶ *Ibid.*, hal. 11-12.

⁷ *Ibid.*, hal. 13.

- a) Memelihara keberlanjutan pengembangan dan perluasan manfaat Kawasan Mandiri Pangan.
 - b) Menerbitkan regulasi/peraturan melalui peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota agar kawasan tersebut dibina untuk mengembangkan kelembagaan dan usaha.
 - c) Penyediaan alokasi dana APBD provinsi maupun kabupaten/kota.
 - d) Menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga permodalan dalam rangka memperkuat usaha dan meningkatkan skala ekonomi.
 - e) Mengembangkan kelembagaan masyarakat agar (1) Lembaga Keuangan Kawasan (LKK) menjadi lembaga yang berbadan hukum sebagai layanan modal dan investasi tingkat kawasan/kecamatan dan (2) Forum Komunikasi Kawasan (FKK) menjadi koordinator pembangunan ketahanan pangan kawasan.
- c) Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan Kawasan Mandiri Pangan diprioritaskan pada pemantapan ketahanan pangan dengan :

- a) Merubah pola pikir/*mindset* masyarakat melalui proses pemberdayaan secara partisipatif dengan menumbuhkan sikap kemandirian dalam berkelompok dan berorganisasi, pengelolaan usaha bersama untuk peningkatan ekonomi (pendapatan) sekaligus mewujudkan ketahanan pangan masyarakat secara mandiri dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal.

- b) Mengembangkan kelembagaan masyarakat melalui proses pelatihan teknis dan pendampingan kepada masyarakat untuk efektivitas pengelolaan modal pelayanannya.
- c) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan dengan melibatkan seluruh lintas sektor/stakeholder untuk mempercepat proses pembangunan di kawasan.⁸
- d) Pendekatan

Pendekatan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan melalui tiga komponen: (a) pemberdayaan masyarakat, (b) penguatan kelembagaan masyarakat, (c) peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perdesaan.

- a) Proses pemberdayaan masyarakat kepada kelompok, yang selanjutnya disebut kelompok dapat dilakukan melalui : (1) pelatihan; (2) demplot; (3) pendampingan; dan (4) peningkatan akses untuk pengembangan kerja sama partisipasi inklusif; (5) peningkatan kapasitas individu dan kelompok, perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik.
- b) Proses penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui: (1) pelatihan teknis (adminkeu, organisasi dan kelembagaan); (2) pendampingan pengelolaan modal kelompok; (3) peningkatan kerja sama dengan lembaga permodalan; dan (4) kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperluas hubungan jejaring modal dan pemasaran.

⁸ *Ibid.*, hal. 13-14.

- c) Proses peningkatan koordinasi lintas sektor dapat dilakukan melalui :
- (1) rapat koordinasi kawasan baik di level pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - (2) pembentukan dan optimalisasi tim teknis di provinsi, kabupateb/kota untuk mendorong percepatan sarana prasarana;
 - (3) dan kerjasama program/kegiatan antar lintas sektor untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan di kawasan.
- Fasilitas pemerintah melalui dana bantuan pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan input: sumber daya alam, sumber daya manusia, dana, teknologi, dan kearifan lokal untuk menggerakkan sistem ketahanan pangan, dari aspek (1) subsistem ketersediaan pangan dalam peningkatan produksi dan cadangan pangan masyarakat; (2) subsistem akses pangan yang menjamin kemudahan akses fisik, peningkatan daya beli, serta menjamin stabilisasi pasokan; dan (3) subsistem pemanfaatan pangan untuk peningkatan kualitas pangan dan pengembangan diversifikasi pangan.
- Dengan berfungsinya sistem ketahanan pangan tersebut diharapkan output dan outcome dapat tercapai, sehingga ketahanan pangan yang berlandaskan kemandirian pangan dapat terwujud. Untuk mengoperasikan strategi tersebut, maka kegiatan kawasan mandiri pangan dilaksanakan melalui 5 tahapan kegiatan : Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan, Kemandirian, dan Keberlanjutan Kegiatan.⁹

⁹ *Ibid.*, hal. 14-16.

4. Tahapan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan

a) Kriteria Penerima Manfaat dan Pendamping

1) Kriteria Penerima Manfaat

- i) Memiliki legalitas (disahkan oleh Bupati/Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten)
- ii) Sanggup memanfaatkan Dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan
- iii) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan keuangan
- iv) Sanggup membuat pembukuan dan pelaporan secara tertib dan periodik

2) Kriteria Pendamping

- i) Pendidikan minimal SPMA/SMU atau sederajat
- ii) Berasal dari tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang memiliki kemampuan dalam melakukan tugas pendampingan.

b) Mekanisme Penetapan Lokasi Penerima Manfaat, Pendamping, LKK dan FKK

1) Mekanisme Penetapan lokasi dan penerima manfaat

- i) FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) Nasional tahun 2015
- ii) Angka kemiskinan desa

Hasil Calon Penerima/Calon Lokasi (CP/CL) yang dilakukan oleh Tim Kabupaten yang selanjutnya diusulkan oleh Kepala Dinas yang menangani ketahanan pangan Kabupaten dan diverifikasi oleh Tim Provinsi (Format 4 dan Format 5). Berdasarkan dua tahapan

diatas, maka penetapan lokasi dan penerima manfaat kawasan ditetapkan melalui Keputusan PPK Provinsi.

2) Mekanisme Penetapan Pendamping

Penetapan pendamping dilakukan melalui Keputusan Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan di Kabupaten. Selanjutnya diusulkan ke Provinsi untuk ditetapkan oleh PPK Provinsi dan disahkan oleh KPA Provinsi.

Tugas Pendamping :

- i) Mendampingi kelompok di desa-desa kawasan
- ii) Bekerjasama FKK, LKK untuk mendampingi dan menggerakkan kegiatan kelompok
- iii) Menyusun rencana kegiatan/rencana kerja pendampingan
- iv) Memberdayakan seluruh RTM yang berada di wilayah sasaran
- v) Membina dan menumbuhkembangkan kelompok-kelompok
- vi) Melakukan pendampingan terhadap kelompok masyarakat dalam merencanakan usaha produktif
- vii) Mengembangkan dinamika kelompok dalam: organisasi, administrasi, tabungan kelompok, dan lainnya
- viii) Menumbuhkan lembaga layanan permodalan bersama-sama FKK dan kelompok komunitas
- ix) Membuat database untuk: pemetaan potensi wilayah kawasan lokasi kegiatan, profil kelompok, dan profil kawasan.¹⁰

¹⁰ Badan Ketahanan Pangan..., hal. 12.

3) Mekanisme Penetapan FKK

Keanggotaan FKK terdiri dari tokoh masyarakat, Camat, penyuluh, tokoh agama, aparat desa, tokoh pemuda, kader penggerak kesehatan, perwakilan kelompok. Penetapan FKK dilakukan melalui Keputusan Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan di Kabupaten. Selanjutnya diusulkan ke Provinsi untuk ditetapkan oleh PPK Provinsi dan disahkan oleh KPA Provinsi.

Tugas FKK:

- i) Bersama pendamping menyusun data potensi, serta permasalahan ketahanan pangan kawasan
- ii) Bersama pendamping memfasilitasi kelompok dalam penyusunan rencana usaha pengembangan kawasan pangan terpadu
- iii) Bersama pendamping memverifikasi usulan rencana usaha yang diajukan oleh kelompok dalam kaitannya dengan pencairan dan pemanfaatan dana pengembangan kawasan
- iv) Bersama pendamping/penyuluh menumbuhkan lembaga permodalan kawasan dan memperkuat serta meningkatkan peran kelembagaan masyarakat
- v) Menjadi motor penggerak penumbuhan kelompok dan lembaga keuangan kawasan
- vi) Memantau dan melaporkan masalah pangan kepada aparat kabupaten/kota serta menyusun rencana tindak lanjut.

4) Mekanisme Penetapan LKK

LKK merupakan lembaga permodalan yang ditumbuhkan di tingkat kawasan berfungsi untuk mengelola, melayani permodalan bagi kelompok kawasan. LKK dipilih dari kelompok atau tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam mengelola keuangan. Penetapan LKK dilakukan melalui Keputusan Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan di Kabupaten. Selanjutnya diusulkan ke Provinsi untuk ditetapkan oleh PPK Provinsi dan disahkan oleh KPA Provinsi. Tugas LKK adalah mengelola keuangan sebagai modal usaha produktif kelompok menjadi lembaga pelayanan modal usaha produktif masyarakat.

c) **Komponen Kegiatan**

Tahap Pengembangan

Komponen kegiatan pada tahap pengembangan ini adalah: (a) pemberdayaan masyarakat; (b) penguatan kelembagaan masyarakat; dan (c) dukungan lintas sektor.¹¹

5. Pembinaan Dan Pendampingan

Pembinaan dan pendampingan dilakukan secara berjenjang pada setiap tingkatan mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk itu perlu dibentuk Tim Asistensi Provinsi serta Tim Koordinator Teknis/Tim Asistensi Kabupaten/Kota.

¹¹ Menteri Pertanian Republik Indonesia Kepala Badan Ketahanan Pangan..., hal. 13-14.

Tim Asistensi Provinsi dan Tim Koordinator Teknis/Tim Asistensi Kabupaten/Kota melaksanakan tugas pembinaan dan pendampingan kegiatan kawasan dalam bentuk:

- a) Sosialisasi tentang maksud, tujuan, manfaat, serta dukungan kegiatan kawasan
- b) Melakukan fasilitasi dalam hal:
 - 1) Pendampingan kepada kelompok masyarakat untuk meningkatkan kapasitas
 - 2) Penguatan kelembagaan masyarakat (kelompok, LKK, dan FKK) agar mampu mengelola kegiatan kawasan untuk mengembangkan usaha produktif
 - 3) Peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan kawasan mencakup pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan sarana prasarana. Berdasarkan laporan diatas, dapat di simpulkan bahwa manfaat dari adanya Kawasan Desa Mandiri Pangan adalah merupakan salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan di desa, kegiatan lintas sektor yang dalam pelaksanaannya memerlukan keterlibatan antar instansi, dan mewujudkan integrasi pengembangan program pembangunan dari pusat, provinsi, dan kabupaten di pedesaan.

Hasil yang diperoleh dari program tersebut diintegrasikan dengan program pembangunan yang telah disusun di tingkat desa. Dalam penerapannya dari pihak dinas telah memberikan bantuan seperti

berbentuk modal dan benih namun kendalanya adalah dari SDM nya yang kurang sehingga untuk mengatasi kendala tersebut dari pihak Dinas melakukan berbagai upaya seperti adanya pelatihan dan sosialisasi agar masyarakat mau memaksimalkannya.

Pada intinya pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang tergabung dalam kelompok adalah upaya dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap perilaku serta memanfaatkan sumberdaya yang ada berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.¹²

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai kemampuan dan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, maupun mata pencaharian, berpartisipasi

¹² *Ibid.*, hal. 33-34.

dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya.¹³

Suatu proses pemberdayaan akan menyediakan sebuah pilihan-pilihan, sebab masyarakatlah yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat yang memilih dengan jelas adalah masyarakat yang mempunyai kualitas.¹⁴ Jadi pemberdayaan adalah suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup seseorang melalui partisipasi yang aktif dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri.

2. Tahapan – Tahapan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”. bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Tahap pertama adalah penyadaran, yang mana pada tahap ini target hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu.

Tahap kedua yaitu, pengkapasitasan manusia dalam arti memampukan manusia baik dalam konteks individu maupun kelompok. Dalam tahap ini dilakukan dalam bentuk daya atau kapasitas tertentu. Misalnya sebelum diberikan peluang usaha, bagi kelompok miskin dibuatkan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR). Sedangkan pada tahap berikutnya yaitu pendayaan,

¹³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2005), hal. 60.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 29.

pendayaan adalah sebuah proses alamiah, dalam arti kita dalam kehidupan wajar sehari-hari.¹⁵

Adapun tahapan pemberdayaan bila dilihat dari sudut pendnagan siklus pengembangan masyarakat ataupun pemberdayaan masyarakat terdiri dari beberapa tahap, antara lain : Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Pelembagaan Program dan Monitoring dan Evaluasi. Program pemberdayaan itu akan sukses dalam memandirikan masyarakat disegala bidangnya bila didukung oleh partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini merupakan faktor esensial dalam mendorong dan bergeraknya peran masyarakat tersebut. Partisipasi akan terwujud dengan baik bila masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan program tersebut memiliki peran dan kewenangan yang lebih baik.¹⁶

a. Tahap Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dalam program pengembangan masyarakat, indikatornya dapat dilihat pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam musyawarah penentuan program, identifikasi masalah, ataupun pembuatan formula kegiatan atau program tersebut. Pada tahap perencanaan ini masyarakat sebagai subjek utama dari pengembangan masyarakat yang diharapkan menjadi perencana sosial yang memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi masalah dan potensi, membuat program serta memprediksi tantangan dan hambatannya.

¹⁵ Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2007), hal. 9.

¹⁶ Tantan Hermansah dan Muhtadi, *Dasar – Dasar Pengembangan Masyarakat dalam Islam*, (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2009), hal. 65.

b. Tahap Pelaksanaan

Partisipasi pada tahap ini, anggota masyarakat akan ikut serta dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya. Rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan diikuti secara seksama dan cermat. Masyarakat harus aktif sebagai pelaksana maupun pemanfaat program. Masyarakat sebagai pelaksana, misalnya berpartisipasi dalam perumusan prosedur, aturan main dan mekanisme pelaksanaan program serta aktif dalam pelaksanaan itu sendiri. Masyarakat sebagai pemanfaat program, bertanggung jawab penuh terhadap program yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga bagi pemanfaatan dan kemandiriannya.

c. Tahap Pelembagaan Program

Partisipasi pada tahap ini, anggota masyarakat ikut serta merumuskan keberlanjutan program. Langkah partisipasinya adalah masyarakat ikut serta dalam merumuskan dan membuat model pendanaan, penguatan lembaga pengelola program dan melakukan pengkaderan anggota masyarakat sebagai penguatan SDM bagi program tersebut. Partisipasi pada tahap ini memiliki makna sangat penting, karena masyarakat yang akan melanjutkan perlu dipersiapkan agar dapat berbuat, berkarya, dan bekerja bagi kesinambungan program tersebut.

d. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Pada tahap monitoring dan evaluasi masyarakat ikut serta mengawasi pelaksanaan program. Pengawasan ini penting agar menjadi program pemberdayaan yang memiliki kinerja yang baik secara administratif

maupun substantif. Kinerja administratif artinya tata pelaksanaan dapat di pertanggung jawabkan dengan dokumen-dokumen pelaporan yang semestinya berlaku atau sesuai dengan perundang-undangan. Kinerja substantif berarti program dapat memberikan perubahan nyata.¹⁷

3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat meliputi kesejahteraan keluarga, memandirikan masyarakat miskin, mengangkat harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah, menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam bertindak. Pemberdayaan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah setempat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diciptakan suatu program pemberdayaan di pedesaan sehingga mampu mensejahterakan keluarga dan masyarakat. Program pemberdayaan bisa dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dalam bentuk pelatihan. Dalam hal ini diperlukan pembinaan-pembinaan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun instansi terkait kepada masyarakat dalam upaya kesejahteraan dan kualitas hidupnya.¹⁸

D. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Badrudin, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi yang memperlihatkan mengenai keadaan kehidupan masyarakat yang bisa dilihat

¹⁷ Eliyati, *Upaya PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang*, (Jakarta : Skripsi tidak diterbitkan, 2012), hal. 35-37.

¹⁸ Ayu Purnami Wulandari. *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga*. (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2014), hal. 5.

dari standar kehidupan masyarakat.¹⁹ Sedangkan menurut Tadaro dan Stephen, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik meliputi, pertama : peningkatan kemampuan dan pemetaan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua : peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik; dan ketiga : memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.²⁰

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Secara umum teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga yaitu *classical utilitarianism*, *neoclassical welfare*, dan *new contraction approach*.

Classical utilitarianism menekankan bahwa kepuasan atau kesenangan seseorang dapat diukur dan bertambah. *Neoclassical welfare* menekankan pada prinsip *pareto optimally*. *Pareto optimum* didefinisikan sebagai sebuah posisi dimana tidak memungkinkan suatu relokasi input atau output untuk menjadikan seseorang menjadi lebih baik lagi tanpa menyebabkan sedikitnya

¹⁹ Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), hal. 56.

²⁰ Michael P. Todaro dan Stephen, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 143.

satu orang atau lebih buruk. *New contraction approach* menekankan pada konsep dimana setiap individu mempunyai kebebasan maksimum dalam hidupnya.²¹

2. Tahapan Kesejahteraan

Menurut Sawidak, kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Meskipun demikian tingkatan kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.²² Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dengan jelas melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan. Mengingat data pendapatan yang akurat sulit diperoleh maka pendekatan yang sering digunakan adalah melalui pendekatan pengeluaran rumah tangga atau daya beli rumah tangga yang bersangkutan.

Apabila daya beli menurun maka kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup menurun sehingga tingkat kesejahteraannya pun menurun. Lebih lanjut Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa suatu rumah tangga dapat dikatakan sejahtera apabila:

- a. Seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup masing-masing rumah tangga itu sendiri.

²¹ Joseph E Stiglitz, Amartya Sen..., hal. 11.

²² Titiek Kurniawati, *Tingkat Kesejahteraan Pengrajin Bambu Di Desa Sendari, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta : Skripsi tidak diterbitkan, 2015), hal. 13-14.

- b. Mampu menyediakan sarana untuk mengembangkan hidup sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²³

3. Indikator Kesejahteraan

Pada sisi lain, indikator kesejahteraan yang ditetapkan oleh BPS meliputi:

a. Kependudukan

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, agama, serta lingkungan. Pengetahuan tentang kependudukan adalah penting untuk lembaga-lembaga swasta maupun pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah, dimana masalah kependudukan saat ini telah memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan pemerintah.

Penduduk usia produktif adalah penduduk pada kelompok usia 15-64 tahun (disebut juga angkatan kerja) yang dapat memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sedangkan penduduk tidak produktif yaitu penduduk pada kelompok usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) yang tidak dapat memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.²⁴

b. Kesehatan dan gizi

Menurut Supariasa, Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat

²³ *Ibid.*, hal 14.

²⁴ *Ibid.*, hal 14-16.

yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi.

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah.²⁵ Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/ wilayah semakin baik. Pada akhirnya hasil dari kegiatan perekonomian adalah tingkat produktifitas penduduk suatu wilayah dapat diwujudkan, bahkan dengan tingkat produktivitas yang tinggi.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta, dan budi nurani). Pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita (tujuan) pendidikan, isi, sistem, dan organisasi pendidikan. Lembaga-lembaga ini meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat.

d. Ketenagakerjaan

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan

²⁵ Titiek Kurniawati, *Tingkat Kesejahteraan...*, hal. 16-17.

kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.²⁶

e. Taraf dan pola konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga.

f. Perumahan dan lingkungan

Rumah merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal yang mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.²⁷

g. Kemiskinan

²⁶ *Ibid.*, hal 18-19.

²⁷ *Ibid.*, hal. 20-21.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

h. Sosial lainnya

Aspek sosial lain seperti akses informasi dan hiburan dan akses terhadap media informasi dan komunikasi juga dapat menjadi bagian dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern.²⁸

Berdasarkan berbagai indikator yang telah dipaparkan, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan bukanlah suatu kondisi yang dapat tercapai dengan sendirinya. Diperlukan upaya-upaya tertentu guna mencapai kondisi kesejahteraan yang dalam hal ini dikenal sebagai upaya pembangunan kesejahteraan.

4. Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menurut M. Umer Chapra adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa

²⁸ *Ibid.*, hal. 21-22.

perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.²⁹

Kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu :

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu terpenuhinya materi yang ditunjang oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual juga mencakup individu dan sosial. Manusia terdiri dari unsur fisik dan jiwa, oleh karena itu kebahagiaan tersebut seharusnya mencakup keseluruhan dan seimbang antara fisik dan juga jiwanya. Serta manusia juga memiliki dimensi individual dan sosial. Dimana manusia akan merasakan kebahagiaan jika memiliki keseimbangan diantara dirinya dnegan lingkungan sekitarnya.
- b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat, dimana manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga akan hidup di alam setelah kematian atau berakhirnya dunia (akhirat). Pencarian materi di dunia ditunjukkan ddalam rangka untuk memperoleh kebutuhan di akhirat saja. Jika keadaan ideal tersebut tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, karena ini merupakan sesuatu yang lebih abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibandingkan dengan kehidupan ketika manusia berada di dunia.

Dalam Islam tentang kesejahteraan juga telah dijelaskan dalam Rukun Islam yang terdiri dari Syahadat, Sholat, Puasa, Zakat, dan menunaikan ibadah haji bila mampu. Dimana kelima Rukun Islam ini dapat diteladani yang

²⁹ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : PRENADAMEDIA, 2015), hal. 2.

merupakan bentuk implementasi dalam menciptakan atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seperti pada Rukun Islam yang pertama yaitu Syahadat, telah mengajarkan manusia untuk senantiasa memiliki komitmen terhadap suatu hal sehingga apa yang manusia lakukan harus memiliki komitmen yang tinggi agar implementasi kesejahteraan bisa terlaksana. Selain itu juga dalam Rukun Islam puasa dan zakat, telah mengajarkan manusia untuk senantiasa berbagi untuk menciptakan keadilan sosial dan terciptanya kesejahteraan masyarakat dan ikut merasakan keadaan sosial manusia lain disekitar mereka.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya kesejahteraan dalam Islam merupakan kesejahteraan yang berhak dan harus dimiliki oleh setiap makhluk Allah SWT. Dimana kesejahteraan yang sesungguhnya tidak hanya soal materil tetapi juga soal spiritual dari setiap makhluk Allah SWT. Itu semua dikarenakan manusia tercipta dengan dua unsur yaitu unsur jiwa dan fisik, sehingga pada kedua hal tersebut harus memiliki tingkat kenyamanan atau kepuasan yang sama. Selain itu dalam kehidupannya manusia diwajibkan juga untuk senantiasa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan kebutuhan akhirat kelak ketika telah mengalami kematian.

5. Masyarakat Pedesaan

Pedesaan adalah bagian integral dari suatu negara maka berarti kemiskinan, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri. Menurut Bintarto, desa merupakan

perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di situ (suatu daerah) dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal-balik dengan daerah lain.³⁰

Ciri-ciri masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut:

- a. Di dalam masyarakat pedesaan memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas-batas wilayahnya.
- b. Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan (*gemeinschaft* atau paguyuban).
- c. Sebagian besar warga masyarakat hidup dari pertanian. Pekerjaan-pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sambilan atau *part time* yang biasa mengisi waktu luang.
- d. Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat-istiadat dan sebagainya.

Masyarakat pedesaan identik dengan istilah gotong-royong yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka.

Kerja bakti itu ada dua macam :

- a. Kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya dari inisiatif warga masyarakat itu sendiri (biasanya di istilahkan dari bawah).
- b. Kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya tidak dari inisiatif warga itu sendiri berasal dari luar (biasanya berasal dari atas).³¹

³⁰Bintarto, *Interaksi Desa-Kota*, (Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 2011), hal. 34.

³¹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2011), hal. 14-18.

Setiap desa memiliki unsur-unsur didalamnya, adapun unsur-unsur desa antara lain adalah : a. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya, b. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat, dan c. Tata kehidupan, dalam hal ini pola pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak berdiri sendiri.

Sedangkan desa memiliki fungsi, yaitu : Pertama, dalam hubungan dengan kota, maka desa yang merupakan "*Hinterland*" atau daerah dukung yang berfungsi sebagai suatu daerah pemberian bahan makanan pokok. Kedua, desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (*raw material*) dan tenaga kerja (*man power*) yang tidak kecil artinya. Ketiga, dari segi kegiatan kerja (*occupation*) desa dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan dan sebagainya. Dari uraian tersebut maka secara singkat ciri-ciri masyarakat pedesaan di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Homogenitas sosial

Bahwa masyarakat desa terdiri dari satu atau beberapa kekerabatan saja, sehingga pola hidup tingkah laku maupun kebudayaan sama atau homogen. Hubungan primer pada masyarakat desa hubungan kekeluargaan dilakukan secara musyawarah.

b. Kontrol sosial yang ketat

Setiap anggota masyarakat saling mengetahui masalah yang dihadapi anggota lain bahkan ikut menyelesaikannya.

c. Gotong royong

Nilai-nilai gotong royong pada masyarakat pedesaan tumbuh dengan subur dan membudaya.

d. Ikatan sosial

Setiap anggota masyarakat pedesaan diikat dengan nilai-nilai adat dan kebudayaan secara ketat.

e. Magis religius

Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat desa sangat mendalam.

f. Pola kehidupan

Masyarakat desa bermata pencaharian di bidang agraris, baik pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial, ekonomi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu : akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap sumber pembiayaan.³²

³² Ayu Purnami Wulandari, *Pemberdayaan Masyarakat Desa...*, hal. 22-25.

Keempat akses ini, disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya, juga diperlukan peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat di desa dan kelurahan untuk membentuk usaha bersama. Tujuan utama dari pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian yang berjudul Peranan Program Desa Mandiri Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan di Desa Sambirobyong Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, penulis menemukan beberapa penelitian yang masih ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan judul penelitian.

Hasil penelitian Erniasih yang berjudul Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Sinergi Program PUAP, Gapoktan dan Desa Mandiri Pangan (Studi Kasus di Beberapa Desa di Kabupaten Grobogan). Menjelaskan mengenai program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Pada penelitian ini terdapat beberapa program yang terlibat diantaranya yaitu program Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP), Gapoktan, dan Desa Mandiri Pangan (Demapan). Persamaan antara ketiga program tersebut adalah sama-sama berbasis desa, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, mendapatkan modal usaha, terbentuknya lembaga

keuangan mikro ditingkat desa dan dibimbing oleh penyuluh dan tenaga pendamping.³³

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami permasalahan, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan koordinasi untuk mensinergikan program-program tersebut agar tujuan awalnya dapat terwujud yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif dan juga sama-sama membahas tentang program pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitiannya. Dimana pada penelitian terdahulu program yang diterapkan adalah program Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP), Gapoktan, dan Desa Mandiri Pangan (Demapan), sedangkan pada penelitian ini hanya menerapkan program Desa Mandiri Pangan (Demapan) saja.

Hasil penelitian Rusastra yang berjudul Dampak Program Desa Mandiri Pangan Terhadap Ketahanan Dan Kemiskinan. Menjelaskan mengenai dampak dari adanya program Demapan terhadap ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan. Dimana terjadi penurunan kekurangan pokok, menurunnya berat balita dibawah standar, rumah tangga dengan kategori sangat miskin menurun dan kategori miskin menurun. Dampak lainnya adalah peningkatan frekuensi makan,

³³ Eko Santoso dan Umi Erniasih, "Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Sinergi Program PUAP, Gapoktan dan Desa Mandiri Pangan (Studi Kasus di Beberapa Desa di Kabupaten Grobogan)", *Forum Ilmu Sosial*, Vol. 43, No. 2, 2016, hal. 1-9.

konsumsi pangan hewani, perbaikan akses ekonomi sandang, dan akses pelayanan kesehatan.³⁴

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan adalah berdampak langsung pada masyarakat, baik itu dilihat dari segi ekonomi maupun segi sosial. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa pemaparan dari hasil yang dijelaskan sangat detail dan terperinci, karena penelitian ini menggunakan model penelitian kuantitatif.

Hasil penelitian Fadli yang berjudul *Kajian Dampak Program Desa Mandiri Pangan Di Provinsi Gorontalo*. Menjelaskan mengenai pelaksanaan program Demapan di Provinsi Gorontalo yang meliputi 4 tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pertumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Sedangkan identifikasi dampak dari program Demapan menggunakan 6 instrumen dasar evaluasi yaitu instruktur, manajemen kelompok, permodalan, sarana prasarana, tenaga kerja dan teknologi.³⁵

Sehingga dampak program Demapan dapat dilihat dari manfaatnya yaitu meningkatnya pangan dan gizi masyarakat, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan menyerap tenaga kerja. Sedangkan untuk dampak yang berupa hasil yaitu tersedianya modal usaha, sarana dan prasarana, dan berkurangnya masyarakat miskin, dan untuk hasil keluarannya yaitu dengan memberikan

³⁴ Valeriana Darwis, Supriyati dan I Wayan Rusastra, "Dampak Program Desa Mandiri Pangan Terhadap Ketahanan Dan Kemiskinan", *Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, Bogor, 2014, hal 1-12.

³⁵ Wawan K. Tolinggi, Supriyo Imran, dan Ahmad Fadli, "Kajian Dampak Program Desa Mandiri Pangan Di Provinsi Gorontalo", hal. 1-15.

pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan yang intensif, menjalin kerjasama dengan universitas, lembaga keuangan, dan swasta.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada tahapan pelaksanaannya ada 4 tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pertumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Serta identifikasi dampak dari program Demapan menggunakan 6 instrumen dasar evaluasi yaitu instruktur, manajemen kelompok, permodalan, sarana prasarana, tenaga kerja dan teknologi. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Dimana penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif sedangkan penelitian ini hanya menggunakan penelitian kualitatif.

Hasil penelitian Apriliani yang berjudul Evaluasi Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul. Menjelaskan mengenai Program Aksi Demapan di Kabupaten Bantul yang dilaksanakan di Desa Muntuk Dlingo dan Desa Selopamioro Imogiri telah berjalan dengan efektif karena telah mencapai sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Sebab dalam penerapannya selalu ada pendampingan kelompok sasaran pada setiap tahapan program. Dimulai dari tahap persiapan, tahap pertumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Sehingga masyarakat mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif yang berhasil mendorong dan memberdayakan masyarakat sasaran. Sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru dan menggerakkan kegiatan ekonomi yang dapat menopang kebutuhan rumah tangga.³⁶

³⁶ Siti Zuchainah dan Indri Apriliani, "Evaluasi Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 15, No. 2, 2010, hal. 1-16.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam hal pemberian pinjaman modal kepada masyarakat. Bahwa dengan adanya bantuan dalam bentuk pinjaman modal kepada masyarakat dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang sudah ada agar dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Dimana penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif sedangkan penelitian ini hanya menggunakan penelitian kualitatif.

Hasil penelitian Prasetyawati yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji. Menjelaskan mengenai salah satu program pemberdayaan masyarakat yang berbasis potensi lokal yaitu Desa Wisata. Desa Wisata sendiri adalah salah satu program pemberdayaan masyarakat yang difungsikan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh suatu desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara mengoptimalkan program Desa Wisata untuk dijadikan sebagai komoditi pariwisata yang berbasis potensi lokal.³⁷

Dengan adanya Desa Wisata maka masyarakat bisa berpartisipasi dalam rangka mensukseskan program Desa Wisata. Dengan adanya perilaku yang mempengaruhi masyarakat dalam hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya Desa Wisata tersebut.

³⁷ Mustangin, Desy Kusniawati, Nufa Pramina Islami, Baruna Setyaningrum, Ani Prasetyawati, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 2017, hal. 1-15.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dalam pemaparan datanya dan sama – sama merupakan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis program yang digunakan. Pada penelitian terdahulu menggunakan program Desa Wisata sedangkan penelitian ini menggunakan program Desa Mandiri Pangan.